



BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA



1.

CAPAIAN KINERJA

2.

ANALIS DAN EVALUASI KINERJA

3.

CAPAIAN ANGGARAN

4.

PERBANDINGAN KINERJA TAHUN KE TAHUN

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1****CAPAIAN KINERJA****3.1.1 Capaian Kinerja BKPSDM**

Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 kinerja Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026. Adapun capaian Kinerja BKPSDM Pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja
BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur yang profesional dan berbasis sistem merit dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas	1. Indeks Profesionalitas ASN	89,8	89,74	98.9%	Sumber Data: Aplikasi SIASN
		2. Indeks Sistem Merit	300	310,5	103,5%	Sumber Data : Keputusan Kepala BKN Nomor 511 Tahun 2024

A. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengatur pelaksanaan pengukuran dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%)



Mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

2. Dimensi Kompetensi (40%)

Mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

3. Dimensi Kinerja (30%)

Mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

4. Dimensi Disiplin (5%)

Mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dengan kriteria nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ringan; nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin sedang; dan nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks Profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2, Kinerja BKPSDM pada Indikator Kinerja Utama “Indeks Profesionalitas ASN” mendapatkan predikat Tinggi karena capaian kinerja BKPSDM adalah sebesar 98,9% dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian hasil yang di dapat dari setiap dimensi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 2

**Nilai Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi
Kabupaten Gresik Tahun 2024**

JUMLAH PNS	DIMENSI				NILAI	KATEGORI
	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN		
6.319	21,14	36,08	26,66	5,00	88,87	Tinggi

B. Indeks Sistem Merit

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit didefinisikan sebagai penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Penerapan manajemen ASN di dalam

Sistem Merit dilaksanakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penilaian Sistem Merit didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Terdapat 9 aspek yang menjadi indikator untuk menilai pelaksanaan Sistem Merit yaitu:

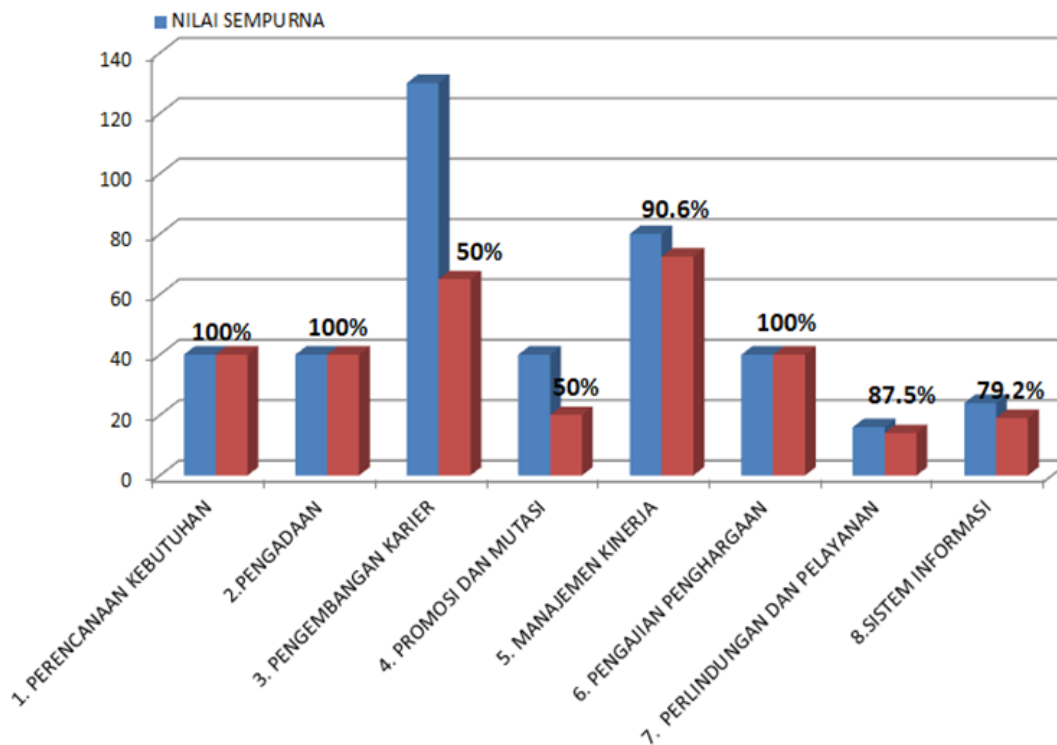
1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karier;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan; dan
8. Sistem informasi.

Adapun penilaian Sistem Merit Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER). Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2, Kinerja BKPSDM pada Indikator Kinerja Utama “Indeks Sistem Merit” mendapatkan predikat melampaui target karena capaian kinerja BKPSDM adalah sebesar 103,5% dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 pelaksanaan program BKPSDM Kabupaten Gresik bertujuan untuk perbaikan Sistem Merit. Berdasarkan hasil penilaian BKN terhadap penilaian pada tiap indikator sistem merit pada tahun 2024 diperoleh penilaian sebagai berikut :

Diagram Grafik

Penilaian Indikator Sistem Merit Kabupaten Gresik Tahun 2024



3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024 mengalami penurunan yang tidak signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023. Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Capaian Kinerja BKPSDM
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			Keterangan
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Indeks Profesionalitas ASN	57	89,74	157,4%	89,8	88,87	98,9%	Menurun
2	Indeks Sistem Merit	275	300,5	109,3%	300	310,5	103,5%	Menurun



Berdasarkan tabel di atas, Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024 mengalami penurunan, baik pada indikator Indeks Profesionalitas ASN maupun pada indikator Indeks Sistem Merit. Pada Tahun 2023 capaian kinerja sistem merit sebesar 109,3% sedangkan tahun 2024 hanya 103,5% penurunan tidak signifikan dan masih melampaui target yang ditetapkan, sedangkan untuk indeks profesionalitas ASN mengalami penurunan dimana juga target tidak bisa mencapai, kinerja hanya 98,9%, berbeda dengan Tahun 2023 yang mencapai kinerja 157,4%.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2024 adalah sebesar 88,87 sedangkan sampai akhir periode Renstra di Tahun 2026 Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan berada pada nilai 90,5. Sedangkan untuk Sistem Merit diharapkan di akhir Tahun 2026 sudah mencapai kategori Sangat Baik atau Nilai “335”. Untuk mempermudah gambaran capaian tahun ini dengan target jangka menengah, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah
BKPSDM Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas ASN	50	49,62	99,24 %	55	53,08	96,51 %	57	89,74	157,4 %	89,8	88,87	98,9 %	89	-	-	90	-	-
2	Indeks Sistem Merit	-	-	-	250	253	101,2 %	275	300,5	109,3 %	300	310,5	103,5 %	325	-	-	335	-	-



3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024 dengan Instansi di Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya

Tabel 3. 5
Capaian Indeks Penerapan Sistem Merit Tahun 2024
pada Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya

NO	INSTANSI PEMERINTAH	NILAI SISTEM MERIT	KATEGORI
1	Pemerintah Kota Surabaya	393	Sangat Baik
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	383	Sangat Baik
3	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	337,5	Sangat Baik
4	Pemerintah Kabupaten Ngawi	329	Sangat Baik
5	Pemerintah Kabupaten Malang	329	Sangat Baik
6	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	323	Baik
7	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	315	Baik
8	Pemerintah Kabupaten Jombang	312	Baik
9	Pemerintah Kota Mojokerto	310	Baik
10	Pemerintah Kabupaten Gresik	310,5	Baik
11	Pemerintah Kabupaten Lamongan	306,5	Baik
12	Pemerintah Kota Kediri	306	Baik
13	Pemerintah Kabupaten Tuban	305,5	Baik
14	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	305	Baik
15	Pemerintah Kabupaten Magetan	304,5	Baik
16	Pemerintah Kota Probolinggo	303	Baik
17	Pemerintah Kabupaten Madiun	299,5	Baik
18	Pemerintah Kota Malang	297	Baik
19	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	296,5	Baik
20	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	295,5	Baik
21	Pemerintah Kota Madiun	295	Baik
22	Pemerintah Kabupaten Jember	292,5	Baik



NO	INSTANSI PEMERINTAH	NILAI SISTEM MERIT	KATEGORI
23	Pemerintah Kota Pasuruan	283	Baik
24	Pemerintah Kabupaten Lamongan	295	Baik
25	Pemerintah Kabupaten Lumajang	288	Baik
26	Pemerintah Kabupaten Kediri	284,5	Baik
27	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	283	Baik
28	Pemerintah Kota Batu	282	Baik
29	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	280,5	Baik
30	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	277	Baik
31	Pemerintah Kabupaten Blitar	272	Baik
32	Pemerintah Kota Blitar	271,5	Baik
33	Pemerintah Kabupaten Pacitan	267	Baik
34	Pemerintah Kabupaten Sumenep	262	Baik
35	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	260	Baik
36	Pemerintah Kabupaten Situbondo	258,5	Baik
37	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	252	Baik
38	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	247	Kurang
39	Pemerintah Kabupaten Sampang	230,5	Kurang
40	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	220	Kurang

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, Capaian Indeks Penerapan Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 berada pada posisi 10 dari 40 Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN II Surabaya. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui BKPSDM akan terus melakukan evaluasi terhadap capaian tersebut sebagai bentuk upaya meningkatkan Nilai Indeks Penerapan Sistem Merit pada Tahun yang akan datang. Sedangkan nilai Sistem Merit berdasarkan Nasional bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6
Tabel Capaian Sistem Merit Nasional
TOP 5 Besar Capaian Sistem Merit Pulau Jawa

NO	Nama Instansi	Nilai Verifikasi
1	Provinsi Jawa Barat	400



2	Kota Surabaya	393
NO	Nama Instansi	Nilai Verifikasi
3	Provinsi Jawa Timur	383
4	Kota Tangerang	373
5	Kabupaten Bandung	356

TOP 3 Besar Nasional Sistem Merit

NO	Nama Instansi	Nilai Verifikasi
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	400
2	Provinsi Jawa Barat	400
3	Kota Surabaya	393

Tabel 3. 7
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024
pada Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH	DIMENSI				NILAI	KATEGORI
			KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN		
1	Pemerintah Kab. Ngawi	7.561	21,06	38,25	28,92	5,00	93,23	Sangat Tinggi
2	Pemerintah Kab. Banyuwangi	7.623	21,21	39,05	24,94	4,99	90,19	Tinggi
3	Pemerintah Kota Kediri	3.852	21,15	38,88	24,83	4,98	89,84	Tinggi
4	Pemerintah Kab. Gresik	6.443	21,33	38,15	25,26	5,00	89,74	Tinggi
5	Pemerintah Kota Malang	5.500	20,37	38,37	24,77	5,00	88,51	Tinggi
6	Pemerintah Kota Madiun	2.745	20,96	36,36	25,01	5,00	87,33	Tinggi
7	Pemerintah Kab. Mojokerto	6.495	21,03	35,27	24,94	5,00	86,24	Tinggi
8	Pemerintah Kota Surabaya	11.027	20,88	32,42	26,28	5,00	84,58	Tinggi
9	Pemerintah Kab. Sumenep	7.497	20,89	32,53	24,74	5,00	83,16	Tinggi
10	Pemerintah Kab. Sidoarjo	8.889	20,80	31,65	24,81	5,00	82,26	Tinggi
11	Pemerintah Kab. Kediri	7.495	21,14	31,21	24,88	5,00	82,23	Tinggi
12	Pemerintah Kab. Lumajang	5.565	20,56	31,12	25,41	4,99	82,08	Tinggi
13	Pemerintah Kab. Madiun	5.621	21,17	30,69	24,97	5,00	81,83	Tinggi
14	Pemerintah Kab. Probolinggo	6.213	21,33	25,66	25,18	5,00	77,17	Sedang
15	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	39.971	21,43	25,36	24,23	5,00	76,02	Sedang



NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH	DIMENSI				NILAI	KATEGORI
			KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN		
16	Pemerintah Kab. Trenggalek	5.828	20,94	23,44	24,67	5,00	74,05	Sedang
17	Pemerintah Kab. Pamekasan	5.080	21,44	26,05	21,27	5,00	73,76	Sedang
18	Pemerintah Kab. Lamongan	7.663	21,28	21,26	25,00	5,00	72,54	Sedang
19	Pemerintah Kota Batu	2.803	21,15	20,38	25,03	5,00	71,56	Sedang
20	Pemerintah Kota Blitar	2.499	20,54	20,35	25,00	5,00	70,89	Rendah
21	Pemerintah Kab. Jombang	6.999	21,25	19,38	24,83	4,99	70,45	Rendah
22	Pemerintah Kab. Tulungagung	7.863	21,24	19,29	24,84	4,99	70,36	Rendah
23	Pemerintah Kab. Pasuruan	8.378	21,22	19,57	24,41	5,00	70,20	Rendah
24	Pemerintah Kab. Bojonegoro	7.119	21,19	18,68	24,86	5,00	69,73	Rendah
25	Pemerintah Kab. Nganjuk	7.517	21,06	18,59	25,00	5,00	69,65	Rendah
26	Pemerintah Kab. Tuban	6.602	21,07	18,19	24,94	5,00	69,20	Rendah
27	Pemerintah Kota Mojokerto	2.318	21,22	21,63	21,29	5,00	69,14	Rendah
28	Pemerintah Kab. Magetan	6.272	21,09	18,20	23,84	5,00	68,13	Rendah
29	Pemerintah Kab. Malang	9.508	21,30	16,70	23,78	5,00	66,78	Rendah
30	Pemerintah Kab. Blitar	6.529	21,41	15,73	23,33	4,99	65,46	Rendah
31	Pemerintah Kab. Jember	8.887	20,57	13,96	24,83	5,00	64,36	Rendah
32	Pemerintah Kab. Bondowoso	6.607	21,02	13,27	24,95	5,00	64,24	Rendah
33	Pemerintah Kota Pasuruan	2.571	20,58	15,52	22,96	5,00	64,06	Rendah
34	Pemerintah Kab. Ponorogo	7.302	21,33	12,67	24,96	5,00	63,96	Rendah
35	Pemerintah Kab. Pacitan	5.607	21,32	12,49	24,90	5,00	63,71	Rendah
36	Pemerintah Kab. Situbondo	5.534	20,46	12,76	24,94	5,00	63,16	Rendah
37	Pemerintah Kota Probolinggo	3.127	20,84	13,17	24,13	5,00	63,14	Rendah
38	Pemerintah Kab. Sampang	6.078	21,34	11,37	24,90	5,00	62,61	Rendah
39	Pemerintah Kab. Bangkalan	7.206	21,32	9,28	20,15	5,00	55,75	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 berada pada posisi 4 dari 39 Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN II Surabaya. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya BKPSDM untuk membangun



satu data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG melalui sosialisasi *tagline* GREAT ASN secara masif.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran BKPSDM Kabupaten Gresik telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis melalui metode *scoring* sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Kriteria Ukuran Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis

NO	KRITERIA	CAPAIAN (%)
1	Sangat Berhasil	dias 100
2	Berhasil	90–100
3	Cukup Berhasil	80–89
4	Kurang Berhasil	70–79
5	Tidak Berhasil	dibawah 69

Adapun hasil analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Realisasi Capaian Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur yang profesional dan berbasis sistem merit dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas		101,2%	Sangat Berhasil
1. Indeks Profesionalitas ASN	98,9%		

2. Indeks Sistem Merit	103,5%		
------------------------	--------	--	--

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 3.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum Realisasi Capaian Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 dalam kategori “Sangat Berhasil”. Adapun keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh:

A. Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang Pengukuran IP ASN tahun 2023 mengalami penyesuaian instrument pengukuran. Penyesuaian dimaksud berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Adanya penyesuaian tersebut menyebabkan nilai IP ASN kabupaten gresik tidak bisa maksimal. Namun, BKPSDM terus melakukan upaya untuk tetap mencapai target yang telah ditetapkan. Bentuk upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan **GREAT ASN** yang merupakan akronim dari Gresik Satu Data Aparatur Sipil Negara. GREAT ASN merupakan *tagline* BKPSDM Kabupaten Gresik dalam rangka Pembangunan Satu Data Kepegawaian yang mutakhir dan valid pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Melalui kegiatan ini juga BKPSDM terus mengalakan sosialisasi kepada seluruh ASN di Kabupaten Gresik untuk terus melakukan update data kepegawaian terutama data kompetensi termutakhir sekaligus melakukan sosialisasi *update* data kepegawaian pada SIMPEG;
2. Mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/1237/ 437.73/2024 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tanggal 13 Agustus 2024.



3. Meluncurkan **GAPURA** (Gerbang Peningkatan Kompetensi menuju Smart ASN) *E-learning* sebagai upaya memenuhi hak ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 20 JP.
4. Meningkatkan koordinasi tim internal BKPSDM agar terus melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk untuk penyusunan strategi upaya pengukuran IP ASN Kabupaten Gresik

Capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 tidak bisa maksimal atau tidak melampaui target yang ditetapkan, hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala dan hambatan yang memerlukan tindak

Tabel 3. 10
Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Tindak Lanjut

NO	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN		TINDAK LANJUT
INDIKATOR 1. INDEKS PROFESIONALITAS ASN			
1	Dimensi Kompetensi	• Kualitas data pengembangan kompetensi pegawai yang telah direkon tidak akurat • ASN yang sudah mengikuti Diklat 20 JP yang tidak mendapatkan nilai kinerja maksimal (Sangat Baik) tidak bisa mendapatkan nilai maksimal	• Mereplikasi program Webinar “ASN Belajar” dari BPSDM Prov. Jatim dengan mewajibkan JFT dan JFU yang jabatannya sesuai dengan tema webinar untuk mengikuti webinar tersebut • Informasi Webinar “ASN Belajar” disebar luaskan kepada seluruh ASN melalui WA Gateway maupun Sosial Media yang dimiliki BKPSDM • Penguatan Impelemntasi GAPURA <i>E-Learning</i> BKPSDM • Peningkatan Koordinasi dan Motivasi kepada OPD agar mampu mencapai target kinerja organisasi
2	Dimensi Kinerja	• Pegawai OPD yang mendapatkan insentif tambahan diluar TPP banyak yang tidak menyusun SKP Tahunan • Adanya Kebijakan terkait Pola distrbusi kinerja yang	• Membuat Surat Edaran kepada seluruh OPD untuk Menyusun SKP 2024 di awal tahun 2025 • Peningkatan Koordinasi dan Motivasi kepada OPD agar



NO	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	TINDAK LANJUT
INDIKATOR 1. INDEKS PROFESIONALITAS ASN		
	menyebabkan jumlah ASN untuk mendapatkan nilai Sangat Baik terbatas tergantung capaian kinerja organisasi	mampu mencapai target kinerja organisasi

B. Indeks Sistem Merit

Dalam rangka upaya meningkatkan nilai sistem merit Kabupaten Gresik Tahun 2024, berbagai upaya dilakukan oleh BKPSDM sebagai wujud komitmen dalam upaya perbaikan. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Assesment dengan bekerja sama dengan BKN untuk mendapatkan pemetaan pada sebagian ASN sebanyak 1,977 pegawai.
2. Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta sebagai sistem manajemen karir ASN; dan
3. Menyusun dan menetapkan beberapa peraturan Bupati untuk mendukung pelaksanaan sistem merit;
4. Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan asistensi secara langsung untuk perbaikan sistem merit Kabupaten Gresik;
5. Meluncurkan **GAPURA** (Gerbang Peningkatan Kompetensi menuju Smart ASN) *E-learning* sebagai upaya mengatasi kesenjangan kompetensi ASN yang dapat diakses oleh seluruh ASN Kabupaten Gresik.
6. Pembangunan Aplikasi kepegawaian yang terintegrasi.

Pada dasarnya pelaksanaan Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi fokus perhatian BKPSDM untuk terus diperbaiki dengan tujuan menciptakan Manajemen ASN sesuai dengan harapan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang tidak bisa dilengkapi oleh BKPSDM Kabupaten Gresik untuk mencapai Sistem Merit pada Kategori Sangat Baik. Kekurangan tersebut menjadi tantangan kinerja BKPSDM untuk dapat diperbaiki. Adapun kekurangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 11
Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Tindak Lanjut

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
INDIKATOR 1.2 SISTEM MERIT			
1	Pengembangan Karir	Belum melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana dan menyusun standar kompetensi jabatan tersebut	Menyusun dan menetapkan Standart Kompetensi Jabatan untuk semua level sampai pelaksana
		Belum menyusun pembobotan potensi dan kinerja secara rinci, lalu diaplikasikan dalam Manajemen Talenta	Menyusun dan menetapkan peraturan tentang pembobotan potensi dan kinerja secara rinci, lalu diaplikasikan dalam Manajemen Talenta
		Belum menyusun rencana suksesi	Mengembangkan Aplikasi Manajemen Talenta untuk penyusunan rencana suksesi
		Belum menyusun analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi untuk seluruh pegawai	Menyusun analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi untuk seluruh pegawai
		Belum menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang	Melakukan koordinasi dan menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang
		Belum melaksanakan program diklat sesuai dengan kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai	Melakukan koordinasi dan melaksanakan program diklat sesuai dengan kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai
		Belum melaksanakan praktik kerja/pertukaran pegawai	Menyusun kebijakan atau peraturan tentang praktik kerja/pertukaran pegawai serta melaksanakan praktik kerja sesuai peraturan tersebut
2	Promosi dan Mutasi	Pelaksanaan pola karir berdasarkan manajemen talenta dan rencana suksesi	Melakukan pengembangan aplikasi manajemen talenta sebagai pelaksanaan pola karir
		Pengisian jabatan administrator dan pengawas belum dilakukan dengan menggunakan metode <i>Assessment</i>	Melakukan koordinasi dengan BKN untuk rekomendasi penggunaan aplikasi manajemen talenta untuk pengisian jabatan
3	Manajemen Kinerja	Penyelenggaraan diklat dan workshop belum didasarkan pada permasalahan kinerja yang telah dianalisis	Melakukan analisis untuk penyelenggaraan diklat dan workshop sesuai dengan permasalahan kinerja
5	Perlindungan dan Pelayanan	Belum menyusun regulasi sebagai payung hukum terkait dengan program tali asih pensiun dan santunan kematian Pemberian bantuan hukum belum dilaksanakan	Menyusun dan menetapkan regulasi terkait program tali asih pensiun dan santunan kematian Pemberian bantuan hukum belum dilaksanakan



3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Gresik dalam mencapai sasaran strategis, yang telah ditargetkan dalam Renstra. Adapun sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Gresik untuk mencapai target sasaran strategis, adalah SDM Aparatur (Tenaga ASN dan Non ASN di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur yang profesional dan berbasis sistem merit dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	89,8	88,87	98,9	2.759.612.113,00	2.019.621.105,00	73%
	Indeks Sistem Merit	300	310,5	103,5	14.013.251.704,00	11.854.805.105	84%

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat Pagu Anggaran BKPSDM Tahun 2024 adalah sebesar Rp 16.772.863.817,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.874.426.210,00 atau sebesar 82,7%. Capaian tersebut masuk dalam kategori Tinggi.



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur yang profesional dan berbasis sistem merit dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	98,9	73%	
	Indeks Sistem Merit	103,5	84%	
Rata-Rata		101,2	79%	17%
Kategori		Sangat Tinggi	Sedang	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{296.584.333.687,70}{1.426.712.855.652,00} \times 100\% \\ = 17 \%$$

Capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 101,2% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 79% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar 17%.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun analisis



keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas terhadap tercapainya laporan kinerja OPD	100%	100%	100%	Menunjang
	Nilai SAKIP BKPSDM	A	A	100%	Menunjang
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tercapainya pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	Menunjang
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100%	99,9%	99,9%	Menunjang
	Persentase Kedisiplinan ASN	100%	96,3%	96%	Menunjang
	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	90%	93%	103%	Menunjang
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100%	100%	100%	Menunjang
	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	90%	99%	109%	Menunjang
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan	Persentase Pengadaan CPNS selama setahun	100%	100%	100%	Menunjang



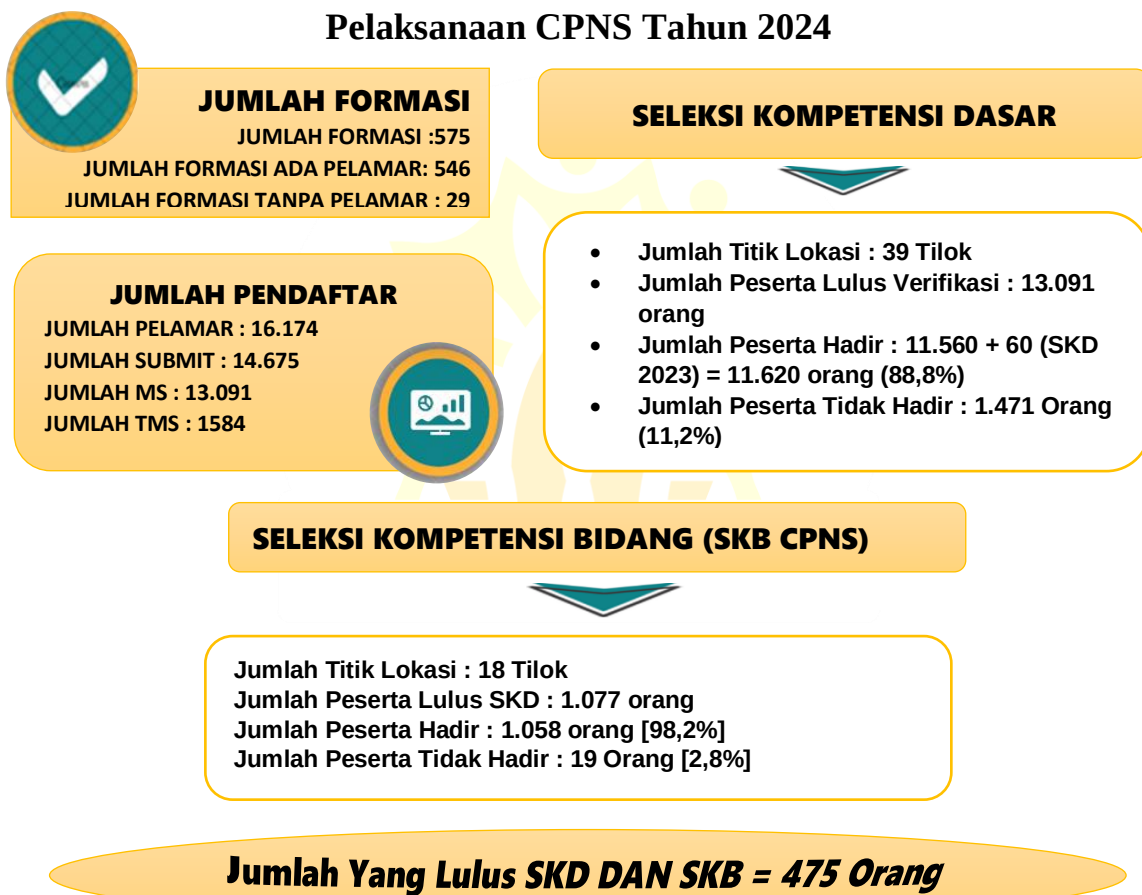
Informasi Kepegawaian	Persentase tingkat akurasi data kepegawaian	100%	100%	100%	Menunjang
	Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri	100%	100%	100%	Menunjang
	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	4	100%	Menunjang
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penataan formasi sesuai kompetensi	100%	100%	100%	Menunjang
	Persentase kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%	Menunjang
	Presentasi KGB tepat waktu	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN sakit menahun yang di uji kelayakan kesehatan oleh TIM penguji kesehatan	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mengumpulkan SKP Sesuai dengan Standar yang berlaku	100%	100%	100%	Menunjang
	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4	4	100%	Menunjang
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	72%	90%	125%	Menunjang
	Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang	80%	54%	68%	Menunjang
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat teknis selama setahun	100%	100%	100%	Menunjang
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat struktural selama setahun	100%	50%	100%	Menunjang
	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3	3	100%	Menunjang
	Persentase fasilitasi terlaksananya tugas belajar ASN	100%	100%	100%	Menunjang



Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Gresik melaksanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Adapun secara keseluruhan, capaian indikator kinerja masing-masing kegiatan telah memenuhi target yaitu 100%. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Pelaksanaan rekrutmen CASN yaitu CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024:

Pelaksanaan CPNS Tahun 2024





PELAKSANAAN PPK 2024

PPK TAHAP 1



JUMLAH FORMASI
JUMLAH FORMASI : 575
JUMLAH FORMASI ADA PELAMAR : 546
JUMLAH FORMASI TANPA PELAMAR : 29

PPK TAHAP 2



PENDAFTARAN PESERTA

Peserta Submit Dari
Tanggal 17 November
Tanggal 20 Januari 2025



SELEKSI ADMINISTRASI

Pelaksanaan Seleksi
Administrasi Sampai 3
Februari 2025



**Proses
Pengumuman
Dan Pelaksanaan
Seleksi Masih
Menunggu
Arahan BKN**

JUMLAH NON ASN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

JUMLAH NON ASN THK 2 & DATA BASE BKN TAHUN 2022 = 2.286
FORMASI PPPK (TAHAP 1 & 2) YANG TERISI = 570 ORANG
FORMASI PPPK PARUH WAKTU SEBANYAK = 1.482 ORANG

BERDASARKAN DATA YANG TERDAFTAR PADA PPPK TAHAP 2 JUMLAH NON ASN YANG MINIMAL
SUDAH BEKERJA 2 TAHUN YANG BELUM TERAKOMODIR PADA DATA BASE BKN SEBANYAK 1.755
ORANG

**DIKLAT
FUNGSIONAL**

1. Diklat Perencana
Diikuti oleh 14 Peserta
2. Diklat Analis Kebijakan

**DIKLAT
TEKNIS**

1. Pelatihan Analisis Kebutuhan Diklat
Diikuti oleh 40 Peserta
2. Pelatihan Evaluasi Dampak Diklat
Diikuti oleh 40 Peserta
3. Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Diikuti oleh 40 Peserta
4. Pelatihan Konvensi Hak Anak
Diikuti oleh 40 Peserta
5. Pelatihan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Diikuti oleh 120 Peserta

**DIKLAT
STRUKTURAL**

1. PKP
Diikuti oleh 30 Peserta
2. PKA
Diikuti oleh 30 Peserta
3. PKN
Diikuti oleh 2 Peserta

**BKPSDM**
KABUPATEN GRESIK**#AKHLAK**
BerAKHLAK
mencentral Pelayanan Publikat kemasyarakatan
harmonis loyal integritas capaian**#bangga
melayani
bangsa**



APLIKASI GAPURA



Aplikasi e-learning berbasis web yang menyediakan berbagai **Pelatihan secara online** untuk dapat di akses oleh **seluruh ASN** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

2. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan ASN

1. **Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT**
Untuk 4 Jabatan
2. **Pelaksanaan Pelatihan**
Sebanyak 3 Kali
3. **Penyerahan SK Kenaikan Pangkat**
Sebanyak 674 PNS
4. **Penyerahan SK Pensiun**
Sebanyak 401 PNS
5. **Penyerahan SK Gaji Berkala**
Sebanyak 3.342 PNS
6. **Penyerahan SK Jabatan Pelaksana**
Sebanyak 150 PNS
7. **Penyerahan SK Kenaikan Jabatan Fungsional**
Sebanyak 186 PNS



3. Pelaksanaan Assesment Center

Penilaian Kompetensi ASN

Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024



Dilaksanakan selama **5 hari** yang dibagi menjadi **2 gelombang**

Dikuti oleh **1.977 PNS (22 % dari jumlah pegawai)** dari total 2.014 PNS yang telah di daftarkan dengan tingkat kehadiran mencapai 98%.

Pegawai yang belum melaksanakan Penilaian Kompetensi ASN sebanyak **6.916 Orang (78% dari jumlah pegawai)**

Rencana Tahun 2025 dengan pagu anggaran yang ada akan melaksanakan Penilaian Kompetensi ASN sebanyak **1200 Pegawai**.

3.2

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 mengalami beberapa kali perubahan, dengan rincian:

1. Pagu APBD Murni Tahun 2024 : 16.849.784.678
2. Pagu APBD Perubahan : 16.772.863.817

Adapun realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 14
Realisasi Anggaran
BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	16.772.863.817,0 0	13.874.426.209,9 9	82,72
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.618.152.245,00	9.225.553.361,00	96,23
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.910.571,00	45.280.450, 00	82,46
(1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	22.503.343,00	22.315.700,00	99,17
(2)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.407.228,00	22.964.750,00	70,86
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.805.970.322,00	6.650.379.445,00	97,71
(3)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.800.056.816,00	6.645.181.045,00	97,72
(4)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.913.506,00	5.189.400,00	87,91
(5)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0
3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.370.748.752,00	2.182.829.908,00	92,07
(6)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	671.369.632,00	602.462.509,00	89,74
(7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.874.801,00	64.236.000,00	100,00
(8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.610.244,00	81.704.090,00	98,90
(9)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	6.419.250,00	5.999.400,00	93,46
(10)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.503.000,00	606.166.786,00	95,38
(11)	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	910.971.825,00	822.261.123,00	90,26



NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.134.000,00	174.939.600,00	99,89
(12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.134.000,00	174.939.600,00	99,89
5	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	211.386.600,00	202.123.958,00	95,62
(13)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.798.600,00	190.762.958,00	95,48
(14)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.590.000,00	11.361.000,00	98,02
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.395.099.459,00	2.599.251.744,00	59,14
6	KEGIATAN PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	849.062.950,00	501.910.131,00	59,11
(15)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	661.801.059,00	358.596.670,00	54,18
(16)	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	110.561.791,00	89.395.696,00	80,86
(17)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	76.700.100,00	53.917.765,00	70,30
7	KEGIATAN MUTASI DAN PROMOSI ASN	901.170.841,00	677.157.779,00	75,14
(18)	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	60.715.568,00	44.016.250,00	72,50
(19)	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	240.456.122,00	188.903.650,00	78,56
(20)	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	599.999.151,00	444.237.879,00	74,04
8	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	2.180.739.516,00	1.281.768.900,00	58,78
(21)	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	31.202.230,00	11.578.100,00	37,11
(22)	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	1.509.099.586,00	1.212.104.500,00	80,32
(23)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	151.194.812,00	4.380.000,00	2,90



NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(24)	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	489.242.888,00	53.706.300,00	10,98
9	KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	464.126.152,00	138.414.934,00	29,82
(25)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.378.514,00	17.729.374,00	69,86
(26)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	341.878.736,00	82.920.000,00	24,25
(27)	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	66.640.902,00	36.634.560,00	54,97
(28)	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.228.000,00	1.131.000,00	3,74
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.759.612.113,00	2.019.621.105,00	73,18
10	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1.181.131.656,00	554.808.145,00	46,97
(29)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.181.131.656,00	554.808.145,00	46,97
11	KEGIATAN SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.578.480.457,00	1.464.812.960,00	92,80
(30)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.578.480.457,00	1.464.812.960,00	92,80